LMA MALAMOI

Sekretariat : Keik Malamoi Jln. Basuki Rahmat Km 13 Kalasaman Sorong Papua Barat
E-mail : lmamalamoi2018@gmail No. HP/WA : 081399363010

Nomor : 235 /LMA-M/EX/VIII/2023.
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen Pernyataan Penolakan dari Maryarakat Adat.
Perihal : Penolakan Atas Kehadiran PT. Hutan Hijau Papua Barat (HHPB) di Kabupaten Sorong.

Kepada Y**th.**
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
Di --
Jakarta

Dengan hormat,
Bahwa Lembaga Masyarakat Adat Malamoi atau disingkat LMA Malamoi adalah organisasi yang hadir dengan tujuan memperjuangkan hak, menyalurkan aspirasi, memberdayakan masyarakat Adat dan menyelenggarakan peradilan Adat. Tujuan organisasi ini diwujudkan dalam komitmen-nya Menjaga Malamoi dalam kondisi dan situasi apapun.

Bahwa sehubungan dengan rencana kehadirnya perusahaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang dulu disebut HPH (Hak Penguasaan Hutan) atas nama PT. Hutan Hijau Papua Barat di distrik Klayili, Sayosa, Sayosa Timur, Maudus, Wemak Kabupaten Sorong dan distrik Salkhma Kabupaten Sorong Selatan seluas 92.148 Ha, sebagaimana sosialisasi di Kota Sorong hari Senin 17 Juli 2023 maka kami menyatakan:

MENOLAK DENGAN TEGAS KEHADIRAN PT. HUTAN HIJAU PAPUA BARAT DI KABUPATEN SORONG DAN KABUPATEN SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.

Surat Pernyataan Penolakan kehadiran perusahaan PBPH PT. Hutan Hijau Papua Barat ini kami sampaikan dengan alasan:

1. Penolakan Masyararakat Adat pemilik hak ulayat pada saat sosialisasi di Kota Sorong hari Senin 17 Juli 2023, dan surat Pernyataan Penolakan dari masyarakat Adat pemilik hak ulayat yang berada di Distrik Klayili, Sayosa, Sayosa Timur, Maudus, Wemak Kabupaten Sorong dan Distrik Salkhma Kabupaten Sorong Selatan.
2. Hutan dan tanah sebagaimana disebutkan pada point 1 (satu) di atas, adalah hutan tersisa di di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Adat, budaya, ekosistem dan lingkungan sehingga harus dijaga dilingdungi.
3. Kami berharap Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungn Hidup RI, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Bupati Kabupaten Sorong dan Bupati Kabupaten Sorong Selatan serta instansi terkait agar meinjau ulaung dan/atau membatalkan segala izin terkait proses Perizinan

Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT. Hutan Hijau Papua Barat seperti pernyataan komitmen, persyaratan teknis, pertimbangan teknis, izin lokasi, ijin AMDAL dan seterusnya kepada PT. Hutan Hijau Papua Barat maupun perusahaan lainnya di atas hutan dan tanah hak milik masyarakat Adat Suku Besar Moi hari ini maupun di masa depan.

Demikian pernyataan dan surat penolakan dari kami dan masyarakat Adat. Atas perhatian dan kebijakannya, kami mengucapkan terima kasih!

"Wadwe Nha Smut Siwefafe"
Klasaman tanah Moi, 02 Agustus 2023

LEMBAGA MASYARAKAT ADAT MALAMOI
Ketua

SILAS O. KALAMI, S.Sos. MA

Tembusan Yth:

1. Dirjen Planologi Kementerian LHK RI di Jakarta;
2. Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK RI di Jakarta;
3. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian LHK RI;
4. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian LHK RI;
5. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian LHK RI;
6. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian LHK RI;
7. Dirjen Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian LHK RI;
8. PJ. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
9. PJ. Bupati Kabupaten Sorong di Aimas;
10. Bupati Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuat;
11. Ketua DPR Kabupaten Sorong di Aimas;
12. Ketua DPR Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
13. Sekjen PB AMAN di Jakarta;
14. Pimpinan NGO, di Sorong;
15. **Yayasan Pusaka Bentala Rakya di Jakarta;** ✓
16. **Greenpeace Indonesia di Jakarta;**
17. **Eknas Wahli di Jakarta;**
18. **---------- Arsip ----------**